

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kecurangan selalu diidentikkan dengan tindakan buruk yang dapat mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian. Hampir sebagian negara pernah mengalami kasus-kasus yang berkaitan dengan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan bisa terjadi dimana saja baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. Pelakunya pun bisa orang biasa yang tidak mempunyai kedudukan hingga orang yang menduduki posisi penting di tempat dimana mereka berada. Selain itu tindakan kecurangan bisa dilakukan seorang diri maupun dilakukan secara bersama-sama dengan perencanaan yang baik pula.

Bentuk kecurangan dilakukan secara bersamaan atau terorganisir tentunya melibatkan banyak pihak, tidak hanya pihak atau orang yang berada didalam entitas saja tetapi pihak atau orang yang berada diluar entitas pun bisa bersama-sama melakukan tindakan kecurangan. Tindakan kecurangan akan terbongkar jika ada pihak atau orang yang berani membuka dan menentang tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang banyak. Pihak atau orang yang berani membongkar atau mengungkap tindakan kecurangan tersebut dikenal sebagai seorang *whistleblower* (seorang pengadu) yang istilah tersebut mulai dikenal di Indonesia.

Menurut Sweeney (2010) pengaduan yang dilakukan oleh *whistleblower* terbukti lebih efektif dalam mengungkap *fraud* dibanding

metode lainnya seperti audit internal, pengendalian internal maupun audit eksternal. Namun penyelenggaraan *whistleblowing system* akan berhasil jika didukung oleh pihak yang turut bekerjasama untuk melaporkan pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. *Whistleblower* dapat berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Tidak ada syarat maupun batasan untuk menjadi seorang pelapor pelanggaran karena siapapun bisa melakukan hal tersebut. Meski *whistleblower* sudah mendapat jaminan perlindungan sebagai mana yang ada dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak semua orang mempunyai keberanian untuk melapor dikarenakan beberapa hal. Misalnya, individu cenderung takut untuk melaporkan ketika menemukan sebuah pelanggaran karena khawatir terjadi sesuatu yang buruk khususnya menyangkut pekerjaannya. Pelapor pelanggaran tidak ingin dianggap sebagai pengkhianat karena melaporkan tindak pelanggaran yang ada didalam organisasi atau entitasnya sendiri. Maka dari itu karyawan atau anggota organisasi cenderung diam atau malah ikut menutupi tindak kecurangan tersebut.

Terdapat banyak cara untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan di instansi atau lingkungannya. Sebagai contoh yang cukup populer diterapkan baik oleh instansi pemerintah maupun swasta adalah penerapan *whistleblowing system* (sistem pengaduan). Sistem tersebut memfasilitasi seorang pengadu untuk mengadukan atau melaporkan jika terjadi indikasi-indikasi tindakan kecurangan yang dapat merugikan tempatnya tanpa orang lain mengetahui bahwa ada yang melaporkan tindakan kecurangan

dikarenakan sistem ini didesain kerahasiaannya. Tetapi sistem ini tidak bisa berjalan secara efektif tanpa adanya komitmen dari seluruh anggota organisasi untuk berpartisipasi menggunakan sistem ini (Winardi, 2013). Selain itu komitmen dari pimpinan atau atasan untuk menerapkan sistem ini secara penuh dan tidak memilih-memilih juga menjadi kunci sistem ini bisa berjalan secara efektif. Perlindungan yang bisa diberikan oleh pimpinan atau atasan terhadap seorang pengadu bisa juga menjadi faktor keberhasilan sistem ini berjalan efektif dikarenakan komitmen untuk melindungi seorang pengadu tersebut dibutuhkan agar seorang pengadu terbebas dari risiko pembalasan yang dilakukan oleh organisasi baik dari atasannya maupun dari rekan kerjanya (Mesmer-Magnus dan Viswesvaran, 2005).

Hampir disebagian tempat baik disektor pemerintahan maupun swasta tindakan kecurangan menjadi satu ancaman yang bisa merugikan banyak pihak. Hal ini juga tidak terlepas pada institusi pendidikan yang mengajarkan praktek-praktek yang sehat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Pada institusi pendidikan dalam hal ini Universitas atau Perguruan Tinggi terdapat dua elemen didalamnya, yakni mahasiswa sebagai pihak yang menerima atau menikmati jasa dan juga dosen atau karyawan sebagai pengelola dan pemberi jasa di institusi pendidikan. Pihak pengelola dan pemberi jasa harus melaksanakan tugasnya dengan memegang teguh prinsip-prinsip kejujuran sehingga praktek-praktek yang dianggap tidak baik bisa diminimalisir. Selain itu mahasiswa sebagai penerima jasa juga harus bisa menjadi pengawas agar pengelola dan pemberi jasa bisa menjalankan tugasnya dengan benar.

Beberapa tahun belakangan ini institusi Perguruan Tinggi menjadi sorotan dikarenakan adanya kecenderungan telah terjadi tindakan kecurangan dalam hal ini adalah tindakan korupsi. *Indonesia Corruption Watch* merilis dua belas pola korupsi yang sering terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi ([www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)). Beberapa pola diantaranya adalah kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan rektor. Pada praktek ini umumnya kecurangan yang dilakukan adalah dalam bentuk suap untuk memenangkan salah satu calon tertentu. Selain itu pengadaan barang dan jasa menjadi pola atau modus yang paling banyak digunakan. Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang kurang transparan menjadi faktor munculnya tindakan kecurangan. Sepanjang tahun 2016 tercatat 14 dari 37 kasus korupsi yang terjadi di Perguruan Tinggi adalah korupsi yang terjadi pada pengadaan barang dan jasa. Hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya salah satu Rektor di Perguruan Tinggi sebagai tersangka oleh KPK atas korupsi pengadaan barang dan jasa.

Selain dua pola atau modus diatas masih banyak lagi pola atau modus yang sering terjadi di Perguruan Tinggi antara lain masalah anggaran internal, penjualan aset Perguruan Tinggi yang hasilnya tidak masuk ke kampus, korupsi dalam pembagian beasiswa, juga praktik pungutan liar, gratifikasi, dana hibah dan CSR, serta suap dan tidak menutup kemungkinan terdapat pola atau modus lain yang bisa memicu terjadinya tindakan kecurangan atau korupsi. Melihat banyaknya pola atau modus kecurangan maka dibutuhkan peran aktif dari seluruh elemen yang berada di Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah mahasiswa. Peran sebagai seorang pengawas terhadap jalannya aktifitas

di Perguruan Tinggi bisa menjadi memunculkan niat mahasiswa untuk mengadukan atau menjadi seorang pengadu jika terjadi tindakan kecurangan.

Seorang pengadu harus mempunyai niatan terlebih dahulu sebelum melakukan pengungkapan tindakan kecurangan dikarenakan niat tersebut yang akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu atau tidak. Terdapat faktor yang dapat memprediksi niat seseorang untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan tersebut. Faktor tersebut berasal dari teori yang diungkapkan oleh Ajzen (1991) yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian. Sebelum berniat untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak, seseorang harus mempunyai sikap terlebih dahulu terhadap perbuatan tersebut. Sikap inilah yang menjadi sebuah persepsi bahwa perilaku yang akan dilakukan berdampak positif atau negatif. Selain persepsi mengenai sikap positif atau negatif terhadap suatu perilaku, faktor orang-orang disekitarnya juga mempunyai peranan penting untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Kemudian faktor kemudahan untuk melakukan perbuatan tersebut juga menjadi pertimbangan seseorang melakukan atau tidak melakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut apakah penerapan faktor-faktor yang terdapat dalam model TPB menjadi alasan individu berminat untuk menjadi *whistleblowing* dengan melakukan penelitian yang berjudul, “Implementasi *Theory Planned Behavior* pada Perilaku *Whistleblowing* dengan Faktor Demografi sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi pada Universitas di Surakarta)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah sikap perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
2. Apakah norma subyektif berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
3. Apakah persepsi kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
4. Apakah *gender* memoderasi sikap perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
5. Apakah *gender* memoderasi norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
6. Apakah *gender* memoderasi persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
7. Apakah usia memoderasi sikap perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
8. Apakah usia memoderasi norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
9. Apakah usia memoderasi persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

## **C. Batasan Penelitian**

Agar penelitian ini memiliki ruang lingkup dan arah penelitian yang jelas maka penelitian ini hanya dibatasi pada ruang lingkup menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi niat mahasiswa akuntansi pada universitas di Surakarta melakukan tindakan *whistleblowing* dengan menggunakan tiga variabel yaitu: sikap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku berdasarkan *theory of planned behavior* dengan moderasi *gender* dan usia.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini digunakan untuk:

1. Menganalisis pengaruh sikap perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
2. Menganalisis pengaruh norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
3. Menganalisis pengaruh persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
4. Menganalisis pengaruh *gender* memoderasi sikap perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
5. Menganalisis pengaruh *gender* memoderasi norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
6. Menganalisis pengaruh *gender* memoderasi persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
7. Menganalisis pengaruh usia memoderasi sikap perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
8. Menganalisis pengaruh usia memoderasi norma subyektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

9. Menganalisis peran usia memoderasi persepsi kontrol perilaku dengan niat melakukan *whistleblowing*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis/Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para akademisi sebagai materi kajian berkenaan dengan tindakan *whistleblowing*, sehingga dapat menambah kajian ilmu akuntansi dalam bidang akuntansi perilaku yang berkaitan dengan tindakan pelaporan pelanggaran.

2. Secara Praktis

Bagi Progdil Akuntanis FEB UMS, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk dapat menerapkan sistem *whistleblowing* dengan tepat. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan akuntansi. Selain itu bagi peneliti, dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan pengungkapan kesalahan yang terjadi pada mahasiswa. Kemudian sebagai sumber informasi data sekunder sebagai pelengkap bagi peneliti lain dan memberikan masukan yang berharga bagi masyarakat.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini bertujuan agar pembaca dapat memperoleh pemahaman secara runtut dan sistematis. Untuk memudahkan pemahaman dan mencapai sasaran yang diinginkan, sistematika penulisannya sebagai berikut:



## BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, tinjauan penelitian sebelumnya, model penelitian, dan pengembangan hipotesis.

## BAB III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, dan metode analisis data yang digunakan.

## BAB IV Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas hasil analisis yang merupakan jawaban dari hipotesis yang telah dikemukakan.

## BAB V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.